



MENGATASI PERUBAHAN IKLIM ADALAH KUNCI UNTUK MENCEGAH KONFLIK

Simon Stiell (tengah), Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), berbicara pada debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB mengenai dampak perubahan iklim dan kerawanan pangan terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional di markas besar PBB di New York, Selasa (13/2). Stiell menekankan pentingnya tindakan cepat melawan perubahan iklim untuk mencegah konflik di masa depan.

Afsel Minta ICJ Kaji Tindakan Darurat untuk Cegah Serangan Israel ke Rafah

Afsel menyebut serangan ke Rafah adalah pelanggaran yang tidak dapat diperbaiki.

JOHANNESBURG - Afrika Selatan (Afsel) telah meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mempertimbangkan apakah rencana Israel memperluas serangan militernya di Jalur Gaza hingga ke Kota Rafah memerlukan tindakan darurat tambahan.

Rafah, yang berbatasan dengan Mesir, merupakan tempat lebih dari 1,5 juta warga Gaza mengungsi.

"Dalam permohonan yang diajukan ke pengadilan (ICJ) kemarin, Pemerintah Afsel mengatakan sangat prihatin serangan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya

terhadap Rafah, seperti yang diumumkan negara Israel, telah menyebabkan dan akan mengakibatkan pembunuhan, kerusakan, dan kehancuran dalam skala besar," kata Kantor Kepresidenan Afsel dalam sebuah pernyataan, Selasa (13/1), dikutip Middle East Monitor.

"Ini pelanggaran serius dan tidak dapat diperbaiki baik terhadap Konvensi Genosida maupun Perintah Pengadilan tanggal 26 Januari," tambah Kantor Kepresidenan Afsel.

ICJ menolak memberi keterangan tentang apakah mereka telah menerima per-

mintaan Afsel. Pada 26 Januari 2024 lalu, panel hakim ICJ diketahui telah membacakan putusan pendahuluan kasus dugaan genosida Israel di Gaza. Afsel adalah pihak yang membawa kasus tersebut ke ICJ.

Dalam putusannya, ICJ menyatakan klaim Afsel selaku penggugat yang menyebut Israel melakukan genosida di Gaza dapat diterima.

ICJ tak menerbitkan perintah gencatan senjata di Gaza seperti yang diharapkan banyak pihak. Namun ICJ memerintahkan Israel mengambil semua tindakan sesuai kewenangannya untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. ICJ mengakui hak warga Palestina untuk dilindungi dari tindakan genosida.

ICJ juga menyerukan Israel segera menerapkan

langkah-langkah guna memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza.

ICJ memerintahkan Israel memberi laporan dalam waktu satu bulan tentang apa yang dilakukannya untuk menerapkan putusan pengadilan. Keputusan ICJ mengikat secara hukum dan tanpa banding. Namun ICJ memang tak mempunyai kemampuan untuk mengagalkan putusannya.

Putusan pendahuluan ICJ belum menentukan apakah Israel melakukan genosida seperti yang dituduhkan Afsel selaku penggugat.

Namun Presiden ICJ, Hakim Joan Donahue, mengatakan dalam putusannya, pengadilan telah menyimpulkan bahwa "situasi bencana" di Gaza bisa menjadi lebih buruk pada saat ICJ menerbitkan putusan akhir. Oleh sebab itu ICJ mengeluarkan putusan pendahuluan. Sidang untuk menentukan apakah Israel melakukan genosida diperkirakan memakan waktu bertahun-tahun.

Sementara itu, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan jumlah warga Palestina yang tewas dalam agresi Israel sejak 7 Oktober telah meningkat menjadi 28.473 orang, termasuk lebih dari 12.300 anak-anak dan sekitar 8.400 wanita.

Setidaknya 68.146 orang terluka, termasuk 8.663 anak-anak dan 6.327 perempuan. Kementerian juga menyebut lebih dari 11.000 orang di antaranya sangat membutuhkan evakuasi. ● tom

Setidaknya 68.146 orang terluka, termasuk 8.663 anak-anak dan 6.327 perempuan. Kementerian juga menyebut lebih dari 11.000 orang di antaranya sangat membutuhkan evakuasi. ● tom

Mahathir Mohamad Kembali Dirawat di Rumah Sakit

KUALALUMPUR - Mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad kembali menjalani perawatan medis di rumah sakit. Kabar terbaru Mahathir masuk rumah sakit ini mencuat setelah mantan PM berusia 98 tahun itu melewati sidang gugatan terhadap Wakil PM Ahmad Zahid Hamidi pada Selasa (13/2) waktu setempat.

Seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (14/2), Mahathir sudah keluar-masuk rumah sakit dalam beberapa waktu terakhir. Dia diketahui memiliki riwayat masalah jantung dan telah menjalani operasi bypass.

Mahathir dijadwalkan menghadiri sidang gugatan terhadap Ahmad Zahid, yang dijadwalkan pada Selasa (13/2) waktu setempat, terkait tuduhan pencemaran nama baik karena mempertanyakan asal usul mantan pemimpin Malaysia itu.

Hakim menunda persidangan itu hingga 19 Juli mendatang, setelah pengacara Mahathir mengungkapkan bahwa kliennya sedang menjalani perawatan medis di Institut Jantung Nasional sejak 26 Januari lalu.

Dalam persidangan, pengacara Ahmad Zahid mengusulkan agar sidang dimulai pada Ok-

tober saja, namun hakim menolaknya dan meminta agar tanggalnya ditentukan lebih awal.

"Kita bisa mengosongkan kasus-kasus lainnya untuk mengakomodasi persidangan ini. Kemungkinan besar, Tun Mahathir adalah salah satu penggugat tertua di pengadilan ini," ucap Komisiner Yudisial Gan Techiong.

Mahathir menjabat sebagai PM Malaysia selama dua dekade, atau tepatnya 22 tahun, hingga tahun 2003 lalu.

Dia kembali menjabat PM pada tahun 2018 setelah memimpin koalisi oposisi yang meraih kemenangan bersejarah dalam pemilu Malaysia. Namun pemerintahannya runtuh dalam waktu kurang dari dua tahun karena pertikaian politik.

Gugatan pencemaran nama baik terhadap Ahmad Zahid diajukan Mahathir pada Juli 2022 lalu. Dalam gugatan itu, Mahathir menuduh Ahmad Zahid telah memfitnah dirinya dalam rapat divisi Partai UMNO.

Mahathir juga menuduh komentar Ahmad Zahid itu dimaksudkan untuk menyiratkan bahwa dirinya tidak terlahir sebagai orang Melayu atau seorang Muslim, dan bahwa nama aslinya adalah Mahathir anak Iskandar Kutty. ● tom

PBB Ungkap 162 Gedung Sekolah di Gaza Hancur oleh Serangan Langsung Israel

WASHINGTON (IM)- PBB mengungkapkan lebih dari 162 gedung sekolah telah diserang oleh Israel secara langsung di Jalur Gaza. "Rekan-rekan kemanusiaan yang bekerja di bidang pendidikan telah menganalisis gambar satelit untuk menilai kerusakan pada sekolah-sekolah di seluruh Gaza. Hasil penilaian mereka menemukan 162 gedung sekolah telah secara langsung terkena dampak, mewakili hampir 30% dari total 563 gedung sekolah di Gaza," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Selasa (13/2).

Ia menambahkan bahwa setidaknya 26 gedung tersebut telah hancur.

"Sebanyak 175.000 siswa dan lebih dari 6.500 guru telah melihat sekolah mereka secara langsung terkena dampak dalam konflik ini. Setidaknya 55% dari sekolah di Gaza akan memerlukan rekonstruksi penuh atau rehabilitasi besar," ungkap Dujarric.

Dujarric juga ditanya apakah Israel dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan di Gaza. Ia menyatakan bahwa pengiriman barang kemanusiaan sangat tidak memadai karena keadaan yang jauh di luar kendali PBB.

"Sangat sulit untuk mendapatkan volume yang kita butuhkan melalui Kareem Shalom (penyeberangan)," katanya.

Ia menambahkan juga ada masalah dengan keamanan truk dan personel setelah mereka memasuki Gaza.

Dujarric juga ditanya apakah Israel dengan sengaja menghalangi bantuan kemanusiaan di Gaza. Ia menyatakan bahwa pengiriman barang kemanusiaan sangat tidak memadai karena keadaan yang jauh di luar kendali PBB.

"Sangat sulit untuk mendapatkan volume yang kita butuhkan melalui Kareem Shalom (penyeberangan)," katanya.

Ia menambahkan juga ada masalah dengan keamanan truk dan personel setelah mereka memasuki Gaza. ● ans



WNI MEMBERIKAN HAK SUARA DI TPS BEIJING

Sejumlah WNI memperlihatkan tinta di jarinya usai memberikan hak suaranya di TPS di KBRI Beijing, Tiongkok, Rabu (14/2). Pemungutan suara melalui TPS bagi WNI yang berada di Beijing dan sekitarnya berlangsung pada Rabu pukul 09.00 - 19.00 waktu setempat.

Korea Utara Kembali Tembakan Sejumlah Rudal Jelajah

PYONGYANG (IM) - Korea Utara (Korut) kembali menembakkan sejumlah rudal jelajah dari lepas pantai timur wilayahnya pada Rabu (14/2) pagi waktu setempat.

Aktivitas peluncuran terbaru Pyongyang itu dipantau secara saksama oleh Korea Selatan (Korsel), negara tetangganya, dan Amerika Serikat (AS).

Seperti dilansir AFP, Rabu (14/2), Kepala Staf Gabungan militer Korsel atau JCS mendeteksi peluncuran sejumlah rudal jelajah dari wilayah Korut, namun tidak disebut secara pasti jumlah rudal yang diluncurkan.

"Militer kami mendeteksi beberapa rudal jelajah tak dikenal di perairan timur laut Wonsan sekitar pukul 09.00 hari ini dan otoritas intelijen Korea Selatan-AS sedang melakukan analisis secara detail," sebut JCS dalam pernyataannya.

Disebutkan JCS bahwa pihaknya "memperkuat pengawasan dan kewaspadaan, dan mengawasi dengan saksama setiap pertanda dan aktivitas tambahan dari Korea Utara".

Peluncuran rudal pada Rabu (14/2) pagi waktu setempat ini menjadi aktivitas peluncuran terbaru Korut dari rentetan uji coba senjata yang dilakukan negara terisolasi tersebut sepanjang tahun ini.

Awal pekan ini, Pyongyang mengumumkan pihaknya telah menguji coba sistem kendali terbaru untuk peluncuran roket multipel yang diklaim akan memiliki peran yang "meningkat" di medan perang.

Sebelumnya, pemimpin Korut Kim Jong Un menetapkan Korsel sebagai "musuh utama"

negaranya, membubarkan lembaga-lembaga yang berdedikasi pada reunifikasi dan interaksi kedua Korea, serta mengancam perang jika terjadi pelanggaran teritorial "bahkan sebesar 0,001 mm" saja.

Korut juga meningkatkan uji coba senjata, termasuk uji coba "sistem senjata nuklir bawah air" dan uji tembakan rudal balistik hipersonik berbahan bakar solid. Negara itu juga meluncurkan rentetan rudal jelajah, yang memicu spekulasi dari para pakar bahwa mereka sedang menguji senjata itu sebelum mengirimkannya ke Rusia untuk digunakan dalam perang di Ukraina.

Pyongyang dan Moscow telah memperkuat hubungan dalam beberapa bulan terakhir, dengan Kim Jong Un melakukan kunjungan langka ke Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin pada September tahun lalu.

Korsel dan AS, sekutunya, menuduh Korut memasok senjata ke Rusia sebagai imbalan atas dukungan teknis Moscow untuk program satelit Kim Jong Un yang baru lahir, yang jelas-jelas melanggar serangkaian sanksi Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kedua negara itu.

Berbeda dengan uji coba rudal balistik, pengujian rudal jelajah tidak dilarang berdasarkan sanksi PBB terhadap Korut saat ini. Rudal jelajah biasanya bertenggang jet dan mampu mengudara pada ketinggian lebih rendah, dibandingkan rudal balistik yang lebih canggih, sehingga lebih sulit dideteksi dan ditembak jatuh. ● ans

Elektabilitas Biden dan Trump Bersaing Ketat di Jajak Pendapat Terbaru

WASHINGTON (IM)- Presiden Amerika Serikat Joe Biden dari Partai Demokrat masih terjebak dalam persaingan ketat dengan rivalnya dari Partai Republik, mantan Presiden Donald Trump untuk pemilu November 2024. Persaingan ini terlihat dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos terbaru yang dipublikasi pada Selasa (13/2).

Menurut jajak pendapat yang berlangsung selama empat hari dan ditutup pada Senin (12/2) lalu, Trump mendapat dukungan dari 37 persen responden sementara Biden mendapat 34 persen dukungan. Margin kesalahan survei sebesar 2,9 poin persentase.

Survei juga mengungkapkan sekitar 10 persen responden mengatakan akan memilih kandidat lain, 12 persen responden tidak akan memilih, dan delapan persen menolak menjawab jajak pendapat nasional yang dilakukan secara daring itu. Survei itu diikuti oleh sekitar 1.237 orang dewasa warga negara Amerika Serikat. Jajak pendapat tersebut dilakukan beberapa hari setelah jaksa federal Robert Hur merilis laporan yang menolok menuntun Biden, 81 tahun, karena dugaan mengambil dokumen rahasia bersama ketika ia meninggalkan kursi wakil presiden pada 2017. Laporan tersebut menggambarkannya sebagai "pria lanjut usia yang bermaksud baik dan memiliki ingatan yang buruk".

Dalam jajak pendapat terpisah, 53 persen responden setuju dengan dugaan Biden mendapat perlakuan khusus karena dia adalah Presiden Amerika Serikat. Sedangkan 46 persen responden mengatakan mereka familiar dengan komentar Hur bahwa mengadili Biden akan sulit karena ia dapat menampilkan dirinya di hadapan juri sebagai lansia yang simpatik, bermaksud baik, dan pria dengan ingatan yang buruk. Gedung Putih dengan tajam membantah

karakterisasi tersebut. Persentase elektabilitas baru Biden dan Trump menunjukkan persaingan yang lebih ketat dibandingkan jajak pendapat bulan lalu, yang menunjukkan Trump unggul sebesar enam poin persentase.

Hal ini juga menunjukkan salah satu potensi tanggung jawab politik besar yang dihadapi Trump adalah empat tuntutan pidana yang sedang dihadapinya. Satu dari empat orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota Partai Republik dan sekitar setengah dari anggota independen yang merespons mengatakan mereka tidak akan memilih Trump jika dia dinyatakan bersalah melakukan kejahatan berat oleh juri.

Sementara Biden menghadapi tantangan berbeda. Presiden Biden kemungkinan akan sulit menggaet suara pemilih dari negara bagian tertentu seperti Michigan, yang memiliki konsentrasi tinggi penduduk muslim, karena kebijakan Biden akhir-akhir ini perih serangan Israel di Gaza.

"Michigan khususnya bisa menjadi persaingan yang sangat ketat dan para pemilih tersebut kecewa dengan kebijakan luar negeri Presiden Biden terhadap konflik di Timur Tengah," kata Brian Brox, Lektor Kepala Ilmu Politik di Tulane University di acara IPCI Global Town Hall pada Selasa (13/2).

Dia menekankan Trump memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan lebih gigih membela Israel, sehingga para pemilih tidak serta-merta akan memilih Trump. Namun jika para pemilih juga tidak memberi suara untuk Biden, hal ini dinilai akan memudahkan Trump unggul di wilayah-wilayah tertentu.

Pemilu Amerika sebagian besar ditentukan oleh isu-isu dalam negeri dan banyak warga Amerika tidak terlalu memikirkan kebijakan luar negeri ketika memilih, kata Brian. Namun isu imigrasi dan konflik Timur Tengah tahun ini mungkin merupakan pengecualian terhadap kecenderungan tersebut. ● tom